

POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA
(Reposisi Peran PTAIN di Era Post Kolonialisme Indonesia)



Diskusi Ilmiah Dosen Tetap UIN Sunan Kalijaga
Tahun Ke -32, 2011 Tanggal 23 Desember 2011
Dipersembahkan oleh: Dr. Munawar Ahmad, S.S., M.Si
Dosen Fakultas Ushubuddin, Studi Agama, Dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MODERATOR : Prof. Dr. H.M. Abdul Karim, M.A., M.A.

Sekretariat
Diskusi Ilmiah Dosen Tetap
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
2011

Politik Pendidikan di Indonesia (Reposisi Peran PTAIN di Era Post Kolonialisme Indonesia)

Oleh
Munawar Ahmad¹

Pendahuluan

Politik Pendidikan di Indonesia saat ini menjadi penting untuk dipahami untuk membaca *political will* Pemerintah dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Hal ini berangkat dari keprihatinan terhadap situasi dan kualitas pendidikan di Indonesia. Sejauh ini dalam pandangan para pengamat pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Kenyataan ini membuktikan begitu lemahnya orientasi politik pendidikan di Indonesia, Secara sederhana, pengertian Politik Pendidikan berorientasi pada

*"Politics, education and, indeed, political education are all forms of intentional action; they are guided by objectives and values. In pluralistic societies the question is how and whether it is possible to reach a consensus on values. As far as the free education of youths and adults is concerned, a good way of reaching consensus might be to put one's trust in public debate, but those responsible for political education have to make sure that these values are legitimate. A modern state is unable to provide an answer as to the greatest good in a pluralistic collection of values. We can agree, however, that the state should seek to prevent evil and that, as a cultural and welfare-based system, it should focus its efforts on positive values. Yet for all this, politics should not be understood as the realization of the most important values but rather as a way of regulating conflict and as a struggle to achieve the best possible system based on commonly recognized objectives, which can be regarded as the guidelines underlying a never-ending process. Politics is not about implementing a historical or moral code; it's about negotiating between a set of interests and objective-fuelled conflicts according to the situation. 'Core values' are not items on a platform to be realized by politics but rather regulative ideas. Orientation according to values and argumentative decision-making processes belong together. Political education has to do justice to these points."*²

¹ Munawar Ahmad, Dosen Ilmu Politik, Prodi Sosiologi Agama, Fak. Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, disampaikan dalam Diskusi Dosen UIN Sunan Kalijaga, 23 Desember 2011

² Bernhard Sutor, *Theoretical Fundamentals*; in: Wolfgang W. Mickel (publisher), *Handbuch zur politischen Bildung*, published by the Federal Centre for Political Education Band 358, Bonn 1999, p. 66-67

Politik pendidikan pada intinya mempersoalkan nilai dan orientasi dari Negara yang harus dan perlu diimplementasikan dalam bidang pendidikan. Politik pendidikan berkaitan erat dengan proses demokratisasi dan liberasi suatu masyarakat. Karena pada akhirnya politik pendidikan akan membentuk hubungan yang erat antara *civic encouraging*, *civic engagement* dan *civic democratizing* terhadap pertumbuhan politik pada suatu peradaban.

Memahami Pertumbuhan Lembaga Pendidikan di Indonesia

Perguruan tinggi yang dewasa ini telah mencapai bentuknya yang mapan dan lengkap sebagai universitas, dengan pilarnya kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan pengelolaan, telah memiliki riwayat yang amat panjang. Embryonya telah muncul di Eropa sejak kurang lebih 400 tahun sebelum masehi, dimulai oleh filosof Plato dengan Taman Academosnya di jaman Yunani purba. Jadi sudah lebih dari 2000 tahun.

Di Indonesia, sejarah ini belum terlalu panjang. Bila Universitas Gajah Mada (UGM, berdiri tanggal 19 Desember 1949) di Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI, berdiri 2 Februari 1950) di Jakarta dianggap sebagai perguruan tinggi tertua, maka catatan ini baru berumur puluhan tahun, walaupun embrio UI sudah ada sejak STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen) di Batavia tahun 1900-an.

Tahun 1870, pemerintah Belanda memberlakukan apa yang disebut *Etische Politiek* di Hindia Belanda, yaitu suatu perubahan sikap Belanda terhadap koloninya karena merasa berhutang budi kepada bumi putera yang telah menyebabkan Nederland dapat membangun dan menjadi makmur. Hal ini didorong oleh paham liberal yang melanda Eropa dengan motonya *liberty*, *equality*, dan *fraternity* yang berdasar pada humanisme.

Program *educatie*, *irigatie*, dan *emigratie* yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi bumi putera (koloni lebih menghasilkan/produktif) mendorong timbulnya sekolah yang semula hanya untuk belajar membaca, menulis, dan menghitung. Untuk menangani pabrik dan perkebunan modernnya, Belanda merasa perlu membuka sekolah tinggi yang kemudian menjadi cikal bakal berkembangnya fakultas-fakultas di Jakarta.

Bermula dari bidang kesehatan, pada tahun 1902 didirikan STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen) yang kemudian menjadi NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School) tahun 1913 dan GHS (Geneeskundige Hoge School) sebagai embrio fakultas kedokteran. Kemudian disusul dengan berdirinya Rechts School tahun 1922 dan menjadi Rechthoogen School tahun 1924 sebagai embrio Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Jakarta tahun 1940 didirikan Faculteit de Letterenen Wijsbegeeste yang kemudian menjadi Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia. Di Bandung tahun 1920 didirikan Technische Hoge School (THS) yang pada tahun itu juga dijadikan perguruan tinggi negeri. Sementara di Bogor juga didirikan Landsbouwkundige Faculteit pada tahun 1941 yang sekarang disebut Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sementara itu di dalam masa perjuangan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, pemerintah RI di Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 mendirikan pula Universitas Gajah Mada. Pada awalnya

Fakultas Hukum dan Kesusasteraan bertempat di pagelaran dan baru kemudian berangsur-angsur pindah ke kampus Bulak Sumur.

Dengan perkataan lain, modal berdirinya universitas atau perguruan tinggi di Indonesia adalah Universitas Indonesia di Jakarta dan Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Kemudian dari dua universitas ini dikembangkan menjadi lima dengan hadirnya Institut Teknologi Bandung (ITB-1959), Institut Pertanian Bogor (IPB-1963), dan Universitas Airlangga (Unair-1954) yang masing-masing berdiri sendiri.

Keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam yang sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Dr. Satiman Wirjosandjojo di Pedoman Masyarakat Nomor 15 Tahun W (1938) pernah melontarkan gagasan pentingnya sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam dalam upaya mengangkat harga diri kaum muslimin di tanah Hindia Belanda. Gagasan tersebut terwujud pada tanggal 8 Juli 1945 ketika Sekolah Tinggi Islam (STI) berdiri di Jakarta. Pada masa revolusi, STI ikut Pemerintah Pusat RI hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 dapat dibuka kembali di kota Yogyakarta tersebut. Pada bulan Nopember 1947 dibentuk panitia perbaikan STI, yang dalam sidangnya sepakat mendirikan Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 10 Maret 1948.

Dalam perkembangannya Universitas Islam Indonesia semakin berkembang pesat dan memiliki 22 Fakultas cabang di Seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1950. PTAIN memiliki empat jurusan, yaitu Jurusan Dakwah (kelak Ushuludin), Qodlo (kelak Syari'ah), dan Pendidikan (kelak Tarbiyah). Sementara di Jakarta, enam tahun kemudian berdiri pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tanggal 14 Agustus 1957 berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957.

Memahami Pola Politik Pendidikan Indonesia

a. Politik Pendidikan Belanda : Mencetak Teknokrasi Murahan

VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) adalah suatu perusahaan dagang yang mempunyai tujuan komersial dengan mencari keuntungan secara besar-besaran untuk kepentingan Belanda. Pada abad 17 dan 18 di Belanda segala kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran dilaksanakan oleh lembaga-lembaga keagamaan, sedangkan pemerintah tidak ikut campur tangan langsung dalam penyelenggaraannya sehingga gereja mempunyai kebebasan yang besar dalam bidang pendidikan. Pada masa kolonial Belanda di Indonesia penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran masih tetap dilakukan dikalangan agama, tapi mereka merupakan pegawai-pegawai VOC.

VOC sangat memerlukan tenaga-tenaga pembantuk yang murah dari penduduk pribumi, sehingga penduduk pribumi tersebut perlu diberikan pendidikan untuk dapat menjalankan tugasnya. Yang memberikan pengajaran dan pendidikan pada mereka adalah orang-orang dari kalangan gereja, maka tidak mengherankan pendidikan VOC adalah agama nasrani (protestan).

Pada saat penjajahan belanda dulu di Indonesia sempat didirikan berbagai jenis sekolah-sekolah belanda yang dibagi-bagi menjadi beraneka ragam jenis, yaitu :

1. ELS (Eurospeesch Lagere School) atau disebut juga HIS (Hollandsch Inlandsch School) sekolah dasar dengan lama studi sekitar 7 tahun. Sekolah ini menggunakan sistem dan metode seperti sekolah di negeri Belanda.
2. HBS (Hogere Burger School) yang merupakan sekolah lanjutan tinggi pertama untuk warga negara pribumi dengan lama belajar 5 tahun. AMS (Algemeen Metddelbare School) mirip HBS, namun setingkat SLTA/SMA.
3. Sekolah Bumi Putera (Inlandsch School) dengan bahasa pengantar belajarnya adalah bahasa daerah dan lama study selama 5 tahun.
4. Sekolah Desa (Volksch School) dengan bahasa pengantar belajar bahasa daerah sekitar dan lama belajar adalah 3 tahun.
5. Sekolah lanjutan untuk sekolah desa (Vervolksch School) belajar dengan bahasa pengantarnya bahasa daerah dan masa belajar selama 2 tahun.
6. Sekolah Peralihan (Schakel School) yaitu sekolah lanjutan untuk sekolah desa dengan lama belajar 5 tahun dan berbahasa Belanda dalam kegiatan belajar mengajar.
7. MULO Sekolah lanjutan tingkat pertama singkatan dari Meer Uitgebreid Lager Onderwijs dengan tingkatan yang sama dengan smp / sltp pada saat jika dibandingkan dengan masa kini.
8. Stovia (School Tot Opleiding Van Inlansche Artsen) yang sering disebut juga sebagai Sekolah Dokter Jawa dengan masa belajar selama 7 tahun sebagai lanjutan MULO.
9. Seminarium Theologicum, Pemerintahan VOC menganggap perlu membuka seminarium untuk mendidik calon-calon pendeta. Hal ini sangat penting karena mereka nantinya akan menjadi seorang pendeta dan guru. Seminarium ini diciptakan oleh Gubernur Jendral Van Imhoff didirikan pada tahun 1745 di Jakarta.

Tiga poin utama dalam politik etis Belanda pada masa itu adalah irigasi, migrasi dan edukasi. Dalam poin edukasi, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah gaya untuk kalangan pribumi. Akan tetapi keberadaan sekolah-sekolah ini ternyata tidak menjadi sebuah sarana pencerdasan masyarakat pribumi. Pendidikan yang disediakan Belanda ternyata hanya sebatas mengajari para pribumi berhitung, membaca dan menulis. Setelah lulus dari sekolah, akhirnya mereka dipekerjakan sebagai pegawai kelas rendah untuk kantor-kantor Belanda di Indonesia. Keengganan pemerintah kolonial Belanda dalam memajukan pendidikan rakyat Indonesia ini bisa dimaklumi, karena masih mendambakan kelestarian penjajahannya. Pemerintah kolonial menyadari, bahwa "Pendidikan akan merupakan dinamit bagi sistem pemerintahan kolonial yang berlaku".

Kebijakannya dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari pola politik kolonial-nya. Alasan penyelenggaraan pendidikan pengajaran, lebih ditekankan pada kepentingan pemerintah kolonial daripada kepentingan rakyat jajahannya sendiri, sebagaimana terlihat jelas dalam kebijakan yang menyangkut agama mayoritas pribumi, dalam ordonansi guru maupun dalam ordonansi sekolah liar.

1. Kebijakan dalam bidang pendidikan dan Islam. Kelestarian penjajahan, betapapun merupakan impian politik pemerintah kolonial. Sejalan dengan pola ini, maka kebijakan dalam bidang pendidikan menempatkan Islam sebagai saingan yang harus dihadapi. Pendidikan Barat diformulasikan

sebagai faktor yang akan menghancurkan kekuatan Islam di Indonesia. Kesadaran bahwa pemerintah kolonial merupakan "Pemerintahan kafir" yang menjajah agama dan bangsa mereka, semakin mendalam tertanam dibenak para santri. Pesantren yang merupakan pusat pendidikan Islam pada waktu itu mengambil sikap anti Belanda.

2. Ordonansi Guru. Suatu kebijakan pemerintah kolonial yang oleh umat Islam dirasakan sangat menekan adalah ordonansi guru. Ordonansi pertama yang dikeluarkan pada tahun 1905 mewajibkan setiap guru agama Islam untuk meminta dan memperoleh izin terlebih dahulu, sebelum melaksanakan tugasnya sebagai guru agama, sedangkan ordonansi kedua yang dikeluarkan pada tahun 1925, hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri. Kedua ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam di negeri ini. Pada tahun yang sama pula yakni tahun 1925 Pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kiyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan itu mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, dan lain-lain.
3. Ordonansi Sekolah Liar. Sejak Tahun 1880 pemerintah kolonial secara resmi memberikan izin untuk mendidik pribumi. Pada tahun 1932 keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah yang tidak ada izinya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah kolonial yang disebut Ordonansi Sekolah Liar. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan Nasionalisme- Islamisme pada tahun 1928, berupa sumpah pemuda.

Pola Politik Pendidikan Masa Kolonial di Indonesia

Periodisasi	Bentuk atau Model Kebijakan Pendidikan	Tujuan atau Arah Politik Kebijakan Pendidikan
Animisme & dinamisme (sebelum 1M)	Pendidikan tidak terlembagakan dan berlangsung secara turun temurun menurut adat suku atau kelompok masyarakat.	Tujuan pendidikan sangatlah praktis untuk menjaga keberlangsungan hidup individu maupun kelompok.
Sinkretisme Budha & Hindu-Syiwa (1M-15M)	Pendidikan yang berbasis keagamaan ini diselenggarakan oleh kaum Brahmana dan hanya diperuntukkan bagi kalangan kerajaan dan bangsawan dengan model pengajaran di kuil-kuil, pondok, maupun secara privat. Kasta rendah tidak diberikan kesempatan untuk berpendidikan	Tujuan pendidikan yang diadakan hanya bagi kasta tertentu ini adalah untuk melanggengkan kekuasaan kaum elit kerajaan dan bangsawan agar rakyat dapat dihegemoni melalui perbudakan.
Islam (12M)	Pendidikan berbasis keagamaan ini diperuntukkan bagi semua golongan masyarakat secara tradisional dan melalui jalan damai. Pengajaran dilakukan di langgar, surau, pesantren, maupun model perjalanan dakwah melalui wali-wali.	Penguasa kerajaan memeluk Islam dan membantu penyebarannya untuk mempermudah hubungan dengan pedagang-pedagang bangsa asing pemeluk agama Islam.

Portugis (16M)	Pendidikan dilakukan di sekolah formal seperti seminari dan sejenisnya, diperuntukkan bagi semua golongan.	Pendidikan berbasis keagamaan ini mengandung misi penyebaran agama Katholik melalui sekolah-sekolah formal.
VOC (1596-1799)	Kebijakan dari VOC yang bekerjasama dengan pihak zending (NZG).	Pendidikan diselenggarakan dengan misi Kristenisasi untuk menghalau pengaruh Katholikisasi Portugis, dan untuk memfasilitasi anak-anak pegawai VOC yang tinggal di negeri jajahan bersama orang tuanya, serta untuk mendapatkan pegawai rendahan dari golongan priyayi pribumi.
Hindia Belanda (1799-1811)	Peraturan umum pendidikan dan pengajaran	Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk memfasilitasi anak-anak pegawai VOC yang tinggal di negeri jajahan bersama orang tuanya, serta untuk mendapatkan pegawai rendahan dari golongan priyayi pribumi.
Inggris (1811-1816)	Pendidikan tidak diperhatikan sehingga mengalami kemunduran.	-
Hindia Belanda (1816-1942)	Regeringsreglement 1848, Dekrit Kerajaan, dan peraturan-peraturan mengenai pendidikan dan pengajaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal dan perangkat-perangkat dibawahnya.	Pendidikan diselenggarakan untuk memfasilitasi anak-anak pegawai VOC yang tinggal di negeri jajahan bersama orang tuanya, serta untuk mendapatkan pegawai rendahan dari golongan priyayi pribumi.
Jepang (1942-1945)	Osamu Sirei No.1 dan Maklumat-maklumat tentang sistem persekolahan	Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk menghilangkan pengaruh Belanda dan menanamkan indoktrinasi Nipponisasi, memperkuat kepentingan perang Jepang, serta meluluskan tenaga kepegawaian untuk pengelolaan pemerintahan.

Sumber : dikutip Annur, dari *Selayang Pandang Pendidikan Pra Kemerdekaan*³

b. Politik Post Kolonial di Indonesia : Mencetak Teknokrasi – Profesional

Kebijakan pendidikan Indonesia dewasa ini sudah pada fase yang di signifikan namun masih banyak kebijakan yang harus memerlukan pemikiran yang lebih masak, sehingga bisa menghasilkan kebijakan pendidikan yang benar - benar final dan sesuai dengan jati diri Bangsa Indonesia. Masih banyak sekali gedung sekolah di Indonesia yang masih belum sesuai dengan standar bangunan kebijakan pendidikan, hal ini mungkin karena kurang merata pembangunan infrastruktur untuk memfasilitasi pendidikan di Indonesia.

Dalam konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 amandemen keempat Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31 ayat (1) berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan," pasal (3) berbunyi, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang," dan ayat (4)

³ Annur, *Selayang Pandang: Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pra Proklamasi Kemerdekaan*, <http://anannur.wordpress.com/2010/08/03/selayang-pandang-kebijakan-pendidikan-di-indonesia-pra-proklamasi-kemerdekaan/>

menyatakan bahwa, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional." Pasal dan ayat-ayat ini merupakan amanat dari cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Amanat tersebut akan semakin diperkuat dengan akan diterbitkannya UU Perguruan Tinggi di Indonesia. Semangat UU PT tersebut menunjukkan adanya liberalisasi atas dunia pendidikan di Indonesia serta penekanan pada pendidikan karakter yang berlandaskan tata filosofis Indonesia. Pelaksanaan pendidikan yang bersumber dari pemahaman filosofis pendidikan yang benar mendasarkan pada konstitusi dan UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal 31 (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan manusia.

Fungsi pendidikan menurut UU Sisdiknas, Pasal 3, berbunyi: "Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa". Secara filosofis, UUD 1945 dan UU Sisdiknas menyebutkan bahwa peradaban bangsa menjadi pokok perhatian dari kedua sumber hukum ini.

Reposisi PTAIN : Mencetak Teknokrasi Berkarakter Islam

Perjalanan politik pendidikan Islam di Indonesia hingga saat sekarang ini telah melalui tiga perodesasi.

1. Periode awal sejak kedatangan Islam ke Indonesia sampai masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam awal abad kedua puluh. Periode ini ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, adayah, surau atau masjid dengan titik focus adalah ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik.
2. Periode ini telah dimasuki oleh ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad kedua puluh. Periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah, dan juga telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam program kurikulum, serta telah mengadopsi system pendidikan modern, seperti metode, manajerial, klasikal, dan lai sebagainya.
3. Pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 tahun 1989) yang kemudian dilengkapi dengan beberapa Peraturan Pemerintah, dan diperkuat pula dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003.

Posisi PTAIN dalam Politik Pendidikan di Indonesia, tidak sekedar sebagai pelengkap atas kebutuhan mencetak tenaga pendidik dalam bidang agama, tetapi juga tetap diarahkan untuk mengembangkan pendidikan yang maju dan adaptatif dengan perkembangan jamannya. Kehadiran PTAIN di tanah air ini sudah mencapai 52 buah, yang berbentuk universitas ada 6 buah. Sampai saat ini, Dikti melansir informasi jumlah Perguruan Tinggi : 3,070 buah, Jumlah PTN : 83 buah (2,7%), Jumlah PTS : 2,987 buah (97,3%).

PTAIN mempunyai posisi penting menurut UU PT menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam kehidupan bangsa dan pembangunan pendidikan menuju bangsa yang berpengetahuan serta berkarakter

Penutup

Politik pendidikan Indonesia bertujuan untuk mengembangkan tiga entitas utama yakni *civic encouraging*, *civic engagement* dan *civic democratizing* terhadap pertumbuhan politik pada suatu peradaban.

Kolonial mendirikan pendidikan dengan tujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang murah untuk mendukung pelayanan administrasi Kolonial. Sedangkan Jepang, lebih memfokuskan pada kebutuhan tenaga kasar untuk memenuhi kebutuhan perang dunia II saat itu.

Pertumbuhan politik pendidikan Indonesia pun segera dimulai seiring dengan upaya melanjutkan kebijakan kolonial dalam mencetak para administrator atau teknokrat kelas rendah menjadi kelas menengah, yakni dengan mendirikan universitas negeri pada masa awal. Dalam masa perjuangan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, pemerintah RI di Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada pada tanggal 19 Desember 1949 mendirikan Universitas Gajah Mada. Sedangkan di sisi lain, pertumbuhan PTAIN juga mulai dirintis bermula dari Sekolah Tinggi Islam (STI)

Politik Pendidikan Indonesia tercermin dari UU tentang Sistem Pendidikan Nasional hingga RUU Perguruan Tinggi tahun 2011, masih tampak kuat dalam meletakkan orientasi pendidikan teknokrasi, dengan penguatan pada nilai sebagai aras utama pendidikan Indonesia, menuju Indonesia cerdas karakter dan cerdas teknokrat.

Referensi

- Annuur, *Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi* Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Bernhard Sutor, 1999, *Theoretical Fundamentals*; in: Wolfgang W. Mickel (publisher), *Handbuch zur politischen Bildung*, published by the Federal Centre for Political Education Band 358, Bonn
- Buchori, Mochtar. 2007 . *Evolusi Pendidikan di Indonesia: Dari Kweekschool Sampai ke IKIP 1852-1998*. Yogyakarta: Insist.
- der Wal, SL. 1977 . *Pendidikan di Indonesia 1900-1940: Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940*. Terjemahan. Jakarta: Depdikbud.
- Djojonegoro, Wardiman. 1996 . *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Gunawan, Ary H. 1995 . *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500- 1900, Dari Emporium Sampai Imperium*, Jilid 1. Jakarta: Gramedia.